



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA DIY 2018

**Disampaikan pada acara
Forum Perangkat Kerja Perekonomian. MUSRENBANG 2017**

jogja
istimewa



Konsep Pertumbuhan Ekonomi DIY Ke Depan

Pertumbuhan Ekonomi Yang INKLUSIF 2018

- **World Bank :**

Pertumbuhan yang fokus pada perluasan skala ekonomi, memperluas akses terhadap aset perekonomian dan berhasil memperluas pasar serta menciptakan pemerataan peluang untuk generasi selanjutnya.

- **UNDP :**

Memberikan definisi mengenai pertumbuhan inklusif berdasarkan sisi produksi dan pendapatan GDP (*Gross Domestic Product*), yaitu proses dan hasil pertumbuhan dimana semua pihak dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama dari pertumbuhan tersebut

INDIKATOR



menurunkan
KEMISKINAN



menurunkan
KETIMPANGAN



Menurunkan
PENGANGGURAN



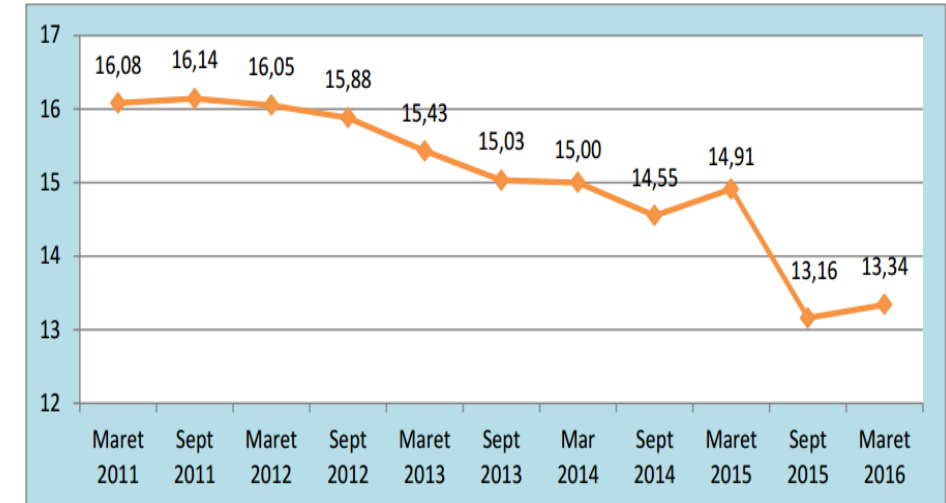
KEBIJAKAN TERHADAP KEMISKINAN DIY

Jumlah Penduduk Miskin di DIY 2011 – 2016
(dalam ribu) :



15
Kecamatan
Kantong
Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan di DIY 2011 – 2016 (dalam %) :



PENYEBAB

- Keterbatasan SDA
- Laju pertumbuhan penduduk tinggi
- Keterbatasan SDM
- Keterbatasan lapangan pekerjaan
- Keterbatasan modal usaha



- Pengembangan Sosial
- Pemberdayaan Masyarakat
- Pemberdayaan UMKM
- Peningkatan program pro rakyat dalam menunjang pelayanan dasar

Perlindungan

Kelompok

SOLUSI

- Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Bersubsidi (Rastra), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
- Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Rumah Murah, Air Bersih, layanan kesehatan, pendidikan, program untuk petani, nelayan



KEBIJAKAN TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DIY

Indeks Williamson menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah. Suatu daerah dapat dikatakan memiliki ketimpangan yang rendah jika nilai Indeks Williamson kurang dari 0,35. Ketimpangan dengan taraf sedang ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson antara 0,35 hingga 0,5. Sedangkan, daerah dengan nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Artinya ketimpangan wilayah DIY pada tahun 2016 (proyeksi optimis 0,486) dan proyeksi tahun-tahun berikutnya tergolong SEDANG, sehingga harus mulai menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Proyeksi IW DIY Tahun 2016 - 2020

Tahun	Optimis	Moderat
2016	0,486	0,558
2017	0,490	0,564
2018	0,494	0,569
2019	0,499	0,574
2020	0,503	0,579

Sumber : Makro Ekonomi DIY, 2016

Faktor Penyebab

- Perbedaan kandungan sumber daya alam
- Perbedaan kondisi demografis
- Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
- Konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu
- Alokasi dana pembangunan antar wilayah tidak tepat
- Investasi yang padat modal
- Pertambahan penduduk yang tinggi
- Ketidakmerataan pembangunan antar daerah

Gali potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif

Bangun infrastruktur yang memadai

Arahkan pembangunan pada wilayah tertinggal

Perlu penyesuaian porsi anggaran untuk masing-masing wilayah

Tingkatkan upaya pembatasan kelahiran

solusi

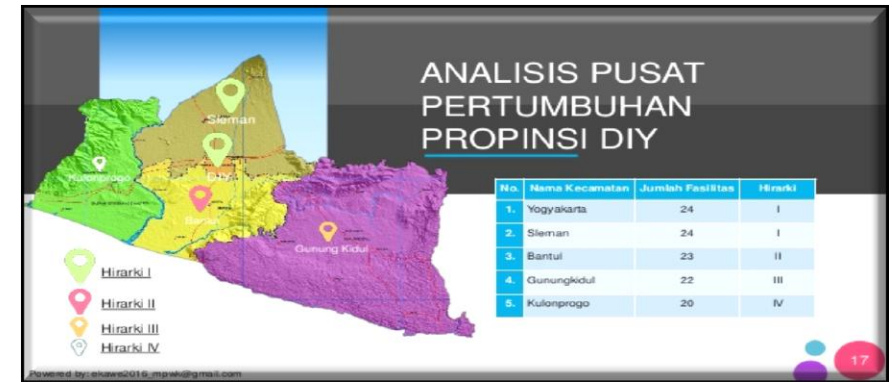
OVOP (*One Village One Product*) terkait dengan industri, koperasi dan UKM, komoditas pertanian dalam arti luas.

Kebijakan pembangunan diarahkan pada 15 kecamatan kantong kemiskinan.

Sesuai arahan pusat anggaran berbasis money follow program yang diarahkan menyasar pada wilayah-wilayah potensi pengembangan ekonomi daerah

Program pembangunan daerah harus mengarah kepada ekonomi kerakyatan

Perlu pengendalian angka tingkat kelahiran



KEBIJAKAN TERHADAP PEMBANGUNAN “NYIA”

Prioritas node:

1. Partisipasi masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM
3. Peningkatan lapangan kerja
4. Pelestarian Budaya & Kearifan Lokal
5. Kelembagaan
6. Peningkatan Pendapatan
7. Tata Ruang Kawasan
8. Obyek Wisata
9. Orientasi Bisnis Bandara
10. Jaringan infrastruktur
11. Ruang public
12. Penggunaan energy
13. Kualitas udara & air

Aerocity:

Awalnya bandara adalah untuk melayani kota modern maka kini bandara itu sendiri telah dipahami juga sebagai kota modern itu sendiri. Bandara sekarang juga mengembangkan fasilitas, pelayanan, dan sumber-sumber penerimaan non-aeronautikal.

Faktor kunci keberhasilan aerocity

- 1) connectivity: the importance of the network;
- 2) competitive region and market place;
- 3) clear strategy and business model;
- 4) value and quality of the site;
- 5) regional governance.

Aspek Sosial dan Ekonomi :

- Modal Sosial
- Strategi Adaptasi Masyarakat
- Motivasi Untuk Berubah

Peran Pemerintah Daerah :

1. Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Wilayah
2. Regulasi Kemudahan Perizinan Usaha dan peningkatan potensi daerah
3. Pemanfaatan dan pengembangan potensi alami daerah/wilayah
4. Percepatan Perubahan Mental Masyarakat
5. Penciptaan potensi daerah/wilayah untuk tujuan wisata
6. Integrasi daerah wisata lokal dengan wisata daerah lain, misalnya dengan membuat poros wisata Jakarta - DIY - Surabaya atau Medan - DIY – Denpasar.
7. Promosi dan pengembangan seni budaya lokal di daerah wisata, dengan penambahan atraksi-atraksi wisata berupa kegiatan budaya yang bersifat harian, bulanan atau tahunan.
8. Pembuatan desa percontohan wisata



Bandara Baru Dalam Konteks Sustainable Development Goals

Peran bandar udara

• Fungsi yang dimainkan oleh suatu bandara dari sisi ekonomi sebetulnya ada dua: sebagai simpul transportasi dan sebagai pusat pertumbuhan dalam ekonomi regional ekonomi

SDGs pada level lokal

• SDGs adalah global tetapi pencapaiannya akan tergantung pada kemampuan di tingkat lokal mengingat semua target SDGs secara langsung terkait dengan **responsibilitas pemerintah lokal dan regional**
Merencanakan pengembangan ekonomi masyarakat

BELANJA YANG WAJIB DAN MENGIKAT



No	Program	Indikator Kinerja	Usulan Kegiatan
1	Penyusunan Kebijakan Pembangunan	60 % bahan rumusan kebijakan menjadi rumusan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan bahan kebijakan investasi, kerjasama, perijinan dan pariwisata 2. Perumusan bahan kebijakan sektor pertanian, ketahanan pangan, perikanan, kelautan, kehutanan dan perkebunan 3. Perumusan bahan kebijakan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM 4. Pengendalian Inflasi Daerah

Di bidang Pengembangan Perekonomian Daerah

Dihasilkan dari kegiatan Analisis yang akan menghasilkan NA untuk bahan rumusan, selanjutnya menjadi rumusan yang kemudian menjadi draft RAPERGUB maupun Draft RAPERDA

Kegiatan perumusan kebijakan dilakukan dengan implementasi fasilitasi, koordinasi dan evaluasi program dalam konteks **KEBIJAKAN STRATEGIS**

Berbasis pada Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Menuju Pengurangan Ketimpangan Wilayah, Penurunan Angka kemiskina, dan menjawab pembangunan New Yogyakarta International Airport

TERIMA KASIH



www.pemda-diy.go.id
www.jogja.go.id
www.bantul.go.id

www.slemankab.go.id
www.gunungkidulkab.go.id
www.kulonprogo.go.id